HAMBATAN IRAN DALAM PEMBANGUNAN *MOBILE POWER PLANT* (MPP) DI INDONESIA

Hadi Sadewo[1]

Abstract: *Iran and Indonesia signed a cooperation agreement in the electricity sector in 2016. Agreement will run for 5 years. Iran promises to build a 5000 MW Mobile Power Plant. However, unitl now Iran side has not carried out development at all even though Indonesia really hopes for such development. Therefore, it's estimed that Iran will experience barriers in the development MPP in Indonesia. Iran barriers in the development the MPP in Indonesia are, due to US economic embargo against Iran in 2018, Iran' involvement in helping the conflict in Yemen, especially the Houthi group, and Iran technology in this case the MPP which was implemented in Iran last year 2017.*

Keywords: Iran, Indonesia, Barriers, Mobile Power Plant

Pendahuluan

Energi merupakan kebutuhan utama dalam keberlangsungan hidup manusia. Jaminan akan keamanan energi *(energy security)* menjadi sangat penting bagi setiap negara karena dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi, kebutuhan dasar manusia bahkan kestabilan negara (Davidl dan Jan H, 2005:98). Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara untuk memastikan kebutuhan energinya terpenuhi, baik melalui pengelolaan sumber daya energi yang mereka punya maupun kerjasama dengan negara lain, seperti kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Iran.

Kerjasama antara Indonesia dan Iran ini bergerak di bidang "Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan" yang diresmikan melalui penandatangan *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 14 Desember 2016 di Tehran, Iran oleh Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Indonesia Ignasius Jonan dan Menteri energi Iran Hamid Chitiran. Salah satu poin dalam kerjasamanya yaitu mengenai pengembangan pembangkit listrik berupa pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) sebesar 5000 MW yang titik pembangunannya disesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang berlaku (Amelia R. Anggita , 2017). MPP adalah alat pembangkit tenaga listrik yang ditenagai oleh gas. Keunggulan utama alat ini bisa dipindah-pindah ke wilayah yang membutuhkan. Teknologinya juga memungkinkan untuk bisa dibangun dimana saja tidak pada lokasi yang membutuhkan sehingga

[1]Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Hadisadewo5@gmail.com

pengerjaan alat tersebut bisa disesuaikan atau fleksibel. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk membangun alat ini hanya sekitar 5-6 bulan saja lebih cepat dibandingkan alat pembangkit biasa yang memakan waktu 6 tahun pembangunan.

Iran tertarik untuk berinvestasi karena adanya program pemerintah Indonesia membangun 35.000 MW energi listrik yang dimulai tahun 2015-2020. Tujuan dari kerjasama tersebut untuk meningkatkan perekonomian serta mempererat hubungan kedua negara yang didasari oleh kepentingan bersama. Untuk Indonesia kerjasama ini bertujuan memenuhi kebutuhan energi listrik dengan membangun pembangkit listrik sedangkan bagi Iran kerjasama ini dapat meningkatkan kondisi ekonomi Iran yang mengalami krisis selama 4 tahun akibat sanksi ekonomi yang dilakukan PBB pada tahun 2012-2015. Dimana Indonesia akan mengimpor gas sesuai dengan kontrak kerjasama di bidang minyak dan gas tahun 2016 sebanyak 500 ribu metrik gas dan Indonesia juga akan berinvestasi di ladang minyak Iran (ESDM.go.id, 2020).

Perkembangan proyek 35.000 MW pemerintah Indonesia hingga tahun 2020 belum mencapai target yang diharapkan. Terlihat pada tahun 2017 energi listrik baru mencapai 1.061 MW atau 3%, tahun 2018 sebesar 2.899 MW atau 8%, dan tahun 2019 sebesar 3.617 MW atau 11%, tahun 2020 sebesar 8.187 MW atau 23% dari total daya yang diinginkan (Primadhyta.S, 2018). Ada beberapa faktor sehingga proyek ini belum berjalan sesuai harapan, yaitu ekonomi Indonesia yang menurun karena tidak sesuai target peningkatan ekonomi 6-7% per tahun, atau kendala pembebasan lahan di beberapa wilayah yang akan dibangun alat pembangkit listrik, dan pengaruh IPP yang merupakan (*Independent Power Producer*) atau pihak swasta yang membantu proyek ini baik pihak swasta dalam negeri ataupun negara-negara lain yang berinvestasi. Kondisi itu menyebabkan target dari proyek 35.000 MW harusnya selesai pada tahun 2019 terundur hingga tahun 2024 (Amanda Gita, 2020).

Iran merupakan salah satu pihak IPP yang berkomitmen membangun MPP sebesar 5000 MW, belum ada kepastian yang dilakukan negara tersebut dibuktikan pada tahun 2017 dilakukan kunjungan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Binsar Panjaitan yang menghadiri pelantikan Presiden Iran Hassan Rouhani sekaligus membahas komitmen Iran berinvestasi di sektor kelistrikan (Amelia R. Anggita , 2017). Pada tahun 2018 masalah kerjasama di bidang energi khususnya MPP juga didiskusikan di sela-sela pertemuan antara wakil Presiden Iran Masoumeh Ebtekar dan wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla di Jakarta (Angriani Desi, 2018). Namun dari beberapa kunjungan tersebut Iran masih belum bisa memastikan bagaimana kelanjutan dari kerjasama ini. Diperkuat dengan konfirmasi dari kementerian ESDM serta urusan Timur Tengah hingga April 2020, dari pihak Iran selaku IPP masih belum melanjutkan kontrak kerjasama ini yang sangat diharapkan oleh Indonesia akan membantu program

pemerintah Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan dari pihak Iran untuk merealisasikan pembangunan MPP di Indonesia.

Kerangka Teoritis

Kerjasama Bilateral *(Bilateral Cooperation)*

Pada dasarnya semua negara di dunia ini tidak ada yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri terutama untuk memenuhi kemajuan dan perkembangan pembangunan dalam negaranya. Setiap negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain karena adanya kondisi saling ketergantungan. Dalam kerjasama ini penulis menggunakan hubungan bilateral sebagai dasar kerangka untuk menganalisis hambatan oleh Iran dalam pembangunan MPP di Indonesia. Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara dua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang jauh dari seberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan kerjasama politik dan struktur ekonomi (Budiono Kusumohamidjojo, 1987: 95).

Keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara kedua pihak atau dua negara (Krisna Didi, 1993:18). Biasanya perjanjian bilateral mengatur tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut dan berfungsi sebagai pengatur kerjasama antar negara yang terlibat. Perjanjian tersebut dapat dikatakan berakhir apabila telah mencapai tujuan dari kerjasama tersebut, periode kerjasama selesai, adanya kesepakatan untuk mengakhiri sesuai dengan prosedur kerjasama, adanya pelanggaran salah satu pihak, diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta lalu diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain, dan merugikan kepentingan nasional (Starke JG,2001:2)

Namun kerjasama antar negara tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Ada faktor-faktor yang dapat menghambat kerjasama tersebut yakni, adanya keinginan dari pemimpin yang sedang berkuasa untuk mengubah perjanjian yang ada seperti pemimpin baru di negara tersebut yang memiliki kebijakan baru untuk membuat perubahan, advokasi birokrasi yaitu proses keikutsertaan masyarakat dalam mengubah kebijakan, adanya restrukturasi domestik suatu negara yaitu upaya dalam negeri untuk memperbaiki permasalahan domestik, kondisi internal yang mempengaruhi negara baik berupa demontrasi maupun pertentangan terhadap kebijakan pemerintah, serta terjadinya *external shock* yaitu pengaruh dari luar sistem ekonomi domestik yang tidak bisa di prediksi seperti embargo, dan krisis keuangan global (Jakob, Gustavsson,1999:76). Faktor-faktor tersebut dapat menjadi penghambat Iran sehingga tidak bisa merealisasikan pembangunan MPP di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu telaah pustaka atau *Library Research* serta teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta nyata yang kemudian dikorelasikan dengan satu sama lain untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan pemenuhan kebutuhan energi listrik sudah sejak lama dihadapi pemerintah Indonesia terutama terkait pemerataan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya adalah akses menuju wilayah atau daerah yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi permasalahan itu baik melalui berbagai kebijakan maupun proyek kerjasama ketenagalistrikan. Jumlah rumah tinggal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 61 juta rumah pada tahun 2012, namun belum semua rumah itu menikmati listrik, masih ada 3,1 juta rumah yang belum teraliri listrik, terutama di wilayah Timur dan Tengah Indonesia yang tinggal di pedesaan dan daerah terpencil.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan listrik tersebut adalah dengan Program Energi Listrik 35.000 MW yang dimulai tahun 2015 dan ditargetkan selesai tahun 2020 yaitu berupa pembangunan infrastruktur energi listrik dengan 397 unit pembangkit listrik yang ada di Indonesia agar semua wilayah di Indonesia bisa terjangkau oleh energi listrik dan rasio elektrifikasi Indonesia bisa mencapai 100%. Untuk memenuhi proyek tersebut maka Indonesia juga membuka peluang bagi negara lain yang ingin berinvestasi ataupun bekerjasama dengan sistem IPP. Salah satunya negara Iran dalam hal ini berupa pembangunan MPP yang akan dibangun di Indonesia sebesar 5000 MW. Kontrak kerjasama ini diresmikan tahun 2016 ditargetkan rampung tahun 2020. Namun hingga saat ini pihak Iran masih belum merealisasikan komitmen dalam kerjasama tersebut yang disinyalir Iran mengalami hambatan baik secara internal atau pengaruh eksternal.

A. Embargo Ekonomi Amerika Serikat (AS) Terhadap Iran

Embargo Ekonomi yang dilakukan AS ke Iran merupakan sebuah pelarangan perniagaan dan perdagangan, terutama ekspor energi Iran ke negara-negara yang biasa bekerjasama dengan Iran. Embargo ini beberapa kali dicabut kemudian kembali diberikan terhadap Iran sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi Iran. Belum lagi pada tahun 2017 terdapat beberapa kasus dalam negeri Iran yang menyangkut keuangan sehingga membuat kondisi internal di Iran mengalami pengaruh padahal Iran baru saja lepas dari sanksi AS pada awal tahun 2016. Kasus mengenai keuangan ini salah satunya yaitu penasehat Presiden Rouhani sendiri yaitu Fereydoun yang ditangkap karena menerima suap 3 juta dolar. Lemahnya hukum dan banyaknya kasus korupsi yang ada di Iran membuat indeks korupsi Iran mengalami kenaikan dari 30 tahun 2017 menjadi 28 tahun 2018 (BBC, 2017). Selain itu sepanjang tahun 2017 banyak dilakukan protes damai oleh warga Iran yang muak dengan korupsi rezim dan pemborosan kekayaan negara untuk mendanai terorisme di luar negeri (Theguardian.com, 2017).

Embargo terhadap Iran dimulai tahun 2012 oleh AS dan UE dengan memberikan sanksi ekonomi kepada Iran karena mengembangkan energi uranium (tidak standar) yang disinyalir untuk kepentingan sipil dan penghasil energi. Sanksi ekonomi terebut berupa membekukan semua transaksi keuangan yang terindikasi berkaitan dengan bank sentral Iran dan memblokir semua aset pemerintah Iran di AS. Sedangkan embargo minyak mempersempit ruang gerak perekonomian Iran. Kenyataannya sanksi ekonomi tersebut mempengaruhi perekonomian Iran, terutama sektor minyak Iran yang cukup besar merasakan dampak dari adanya embargo tersebut. Embargo minyak dengan cepat menurunkan produksi dan transaksi ekspor minyak Iran. Menyebabkan produksi minyak Iran turun 90% menjadi rata-rata sekitar 3,3 juta barel per hari (bph), dan kehilangan lebih dari 300 ribu bph tahun tersebut dan 200 ribu bph pada tahun 2013 (Raharjo S.N.I, 2020).

Untuk menanggulangi masalah sanksi yang membuat ekonomi Iran terhambat maka pada tahun 2015 dibentuklah kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) yaitu sebuah kesepakatan dengan imbalan untuk pencabutan terhadap sanksi kepada Iran. Perjanjian tersebut digagas bersama AS, Iran, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, China, dan Uni Eropa, yang membahas mengenai Iran harus menghentikan program pengembangan nuklirnya, di mana Iran akan diawasi tim pemantau nuklir PBB dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Selama kesepakatan tersebut dibentuk akhirnya sanksi terhadap Iran dicabut pada tahun 2016 sehingga ekonomi Iran berangsur meningkat pada saat itu.

Dalam kurun waktu 2 tahun pada tahun 2018 salah satu negara penggagas kesepakatan JCPOA yaitu AS menarik dirinya secara sepihak dari JCPOA tersebut karena pemerintah AS khususnya Presiden Donald Trump, menganggap kesepakatan pada 2015 lalu merupakan kesepakatan terburuk. Karena menurut Trump, perjanjian tersebut tidak menyertakan larangan program rudal balistik Iran atau dukungan Tehran terhadap kelompok Hizbullah dan Presiden Bashar Al-Assad di Suriah.

Keluarnya AS dari kesepakatan tersebut disertai dengan pemberian sanksi kembali kepada Iran di tahun 2018 yang menyebabkan krisis ekonomi di Iran. Kondisi ini sangat tidak terduga bagi Iran sanksi yang dijatuhkanpun meliputi sektor otomotif, logam mulia, bahan makanan, dan perdagangan. Tidak sampai itu saja ternyata ada sanksi tahap kedua yang dijatuhkan yaitu, meliputi sektor migas dan bank sentral. Akibat sanksi tersebut nilai mata uang Iran jatuh lebih dari 100% yang memicu kenaikkan harga barang yang signifikan.

Banyaknya sanksi yang telah dijatuhkan kepada Iran membuat negara tersebut sulit mendapatkan pemasukkan ekonomi. Iran tidak lagi bisa mengekspor minyaknya sehingga ekspor Iran menjadi 0 dan sama sekali tidak memiliki sumber pendapatan utama (Aghazadeh, 2014:35). Sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh AS tahun 2018, berdampak pada menurunnya jumlah produksi dan ekspor minyak Iran yang merupakan negara terbesar keempat yang mempunyai cadangan minyak terbesar didunia. Dalam hal ini minyak merupakan sumber utama kehidupan Iran karena pendapatan dari penjualan minyak memiliki pengaruh besar terhadap perekonomiannya.

B. Keterlibatan Iran Dalam Konflik Yaman

Selain embargo yang diberikan oleh AS kepada Iran keterlibatan Iran dalam mendukung kelompok Houthi juga menjadi faktor penghambat Iran merealisasikan komitmennya terhadap pembangunan MPP di Indonesia. Keterlibatan Iran dalam konflik Yaman ini berupa bantuan persenjataan, bahan pangan, pelatihan militer, bantuan tentara nasional Iran dan bantuan lainnya yang bisa melancarkan gerakan kelompok Houthi di Yaman sejak 2015 hingga sekarang. Bila dilihat pada tahun 2015 Iran masih dilanda krisis ekonomi kemudian di tahun 2018 dijatuhi embargo ekonomi oleh AS, tetapi Iran masih berupaya mendukung kelompok Houthi di Yaman.

Dukungan Iran kepada Houthi terjadi pada tahun 2015. Namun, Konflik ini berawal dari tahun 2011, pada saat itu Yaman mengalami sebuah revolusi. Revolusi tersebut pun berujung pada kejatuhan pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh, mengakhiri rezimnya yang telah berjalan selama 22 tahun di Yaman. Kepresidenan Yaman pun akhirnya jatuh kepada wakil presiden pada era pemerintahan Saleh, Abdrabbuh Mansur Hadi. Hadi dianggap sebagai presiden

sementara yang dipilih karena kompromi politik, dengan naiknya ia sebagai presiden berdasar kepada dukungan negara lainnya, terutama Arab Saudi beserta anggota-anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC). Naiknya Hadi sebagai presiden tidak menyenangkan banyak pihak, dengan dua diantaranya adalah kroni-kroni Saleh dan kelompok revolusioner Houthi.

Pada tahun 2014, kelompok Houthi pun mulai memberontak dan mengambil alih sejumlah wilayah di utara Yaman. Seiring menguatnya posisi kelompok pemberontak Houthi, Ali Abdullah Saleh pun bergabung ke kelompok pemberontak Houthi dan kemudian menjadi salah satu figur sentral dalam Pemberontakan Houthi, sehingga semakin menguatkan posisi kelompok pemberontak Houthi di Yaman.

Iran memberikan bantuan kepada Syi'ah Houthi terhitung sejak tahun 2005, hal tersebut diungkapkan oleh seorang di Yaman utara, ia mengungkapkan bahwa Iran mendanai pembelian roket kelompok dan melatih petempur di sa'ada. Tidak hanya pada tahun 2005, pada saat pemberontakan kelompok Syi'ah Houthi dengan Arab Saudi pada bulan April 2009, telah ditemukan kapal Iran bernama Mahan yang berisi senjata yang dijelaskan oleh seorang awak kapal Iran bahwa senjata tersebut akan diturunkan isinya di kota Harad yang terletak di provinsi sa'ada untuk kemudian dibawa ke sebuah peternakan di Yaman dan kemudian akan diambil oleh Syiah Houthi (Octa Rizky P.C, 2014-2015:9). Laporan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengindikasikan bahwa Teheran telah mendukung Syiah Houthi sejak tahun-tahun awal pemberontakan militan Syiah tersebut.

Kemudian tahun 2013 Iran mengirim kapal untuk kelompok Houthi yang bernama Jihan pada tahun 2013 yang mengangkut 40 ton senjata seperti roket Katyusha M-122, *heat-seeking surface-to-air missiles*, RPG-7s, *night vision goggles* buatan Iran, sistem artileri yang melacak tanah dan angkatan laut dengan target sejauh 40 KM, ada juga *silencer*, 2,66 ton bahan peledak RDX, C-4 bahan peledak, amunisi, peluru dan transistor listrik.

Bantuan Iran berlanjut pada 28 Februari 2015 dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Houthi untuk mengadakan penerbangan udara langsung antara Teheran dan Sana'a sebanyak 28 kali dalam sepekan (Carole Landry, 2021). Iran dan Syiah Houthi juga mengadakan perjanjian kemitraan ekonomi pada 12 Maret 2015, dan juga termasuk kesepakatan yang menjanjikan pasokan minyak dari Iran selama satu tahun (timesofisrael.com, 2021). Pada tanggal 11 Mei 2015 Iran mengirim kapalnya bernama Iran Shahed yang berisi 2.400 ton makanan seperti tepung, beras dan gula, serta 100 ton obat-obatan yang ditujukan kepada Syiah Houthi. Kemudian pada tanggal 7 Juni 2015, kembali ditemukan kapal Iran yang dilaporkan telah membawa bantuan bagi Syiah Houthi, kargo yang dijuluki Arezou (keinginan),

kapal ini mengangkut 8.000 ton beras dan 1000 ton gula dari pelabuhan Imam Khomeini.

Berbagai bantuan yang dilakukan Iran secara terus-menerus setiap tahunnya cenderung menunjukkan bahwa Iran memprioritaskan Houthi secara maksimal. Padahal bantuan yang diberikan Iran yang tak henti tersebut tidak dibalas atau Houthi tidak memberikan timbal balik kepada Iran sehingga bisa dikatakan bukan suatu hubungan yang saling menguntungkan karena Iran sendiri tidak mendapatkan apa-apa dari Houthi.

Selain memberikan persenjataan atau artileri terhadap pemberontak Houthi Iran juga memberikan pelatihan bagi ribuan pemberontak Syiah Houthi Yaman di kamp pelatihan Suriah Selatan dari 2015 hingga sekarang. Pemberontak ini dikumpulkan di Iran dan kemudian diterbangkan ke Suriah, kadang berkumpul di Beirut dan diangkut melalui darat ke Suriah. Adanya pelatihan ini mendorong kelompok Houthi untuk sigap dan siap di medan pertempuran (Octa Rizky P.C, 2014-2015:11)

Dilaporkan oleh Brigadir Jenderal Ahmed Asseri, Syiah Houthi mendapatkan dana dari Iran untuk membayar pasukannya seharga 100 dollar AS per hari, dengan diiming-imingi bayaran tersebutlah Houthi berhasil merekrut rakyat Yaman sebagai pasukannya. Bayaran yang ditawarkan Syiah Houthi ditambah dengan krisis ekonomi yang melanda negaranya, kondisi inilah yang membuat sebagian rakyat Yaman memilih bergabung dengan Syiah Houthi.

Bantuan Iran yang diberikan kepada Houthi dari tahun 2015 hingga sekarang memperlihatkan Iran sangat antusias terhadap konflik di Yaman yang sedang terjadi sehingga tidak memperdulikan kondisi negaranya dimana pada tahun 2018 Iran dijatuhi embargo ekonomi oleh AS. Padahal embargo ekonomi yang di alami Iran pada tahun 2018 tersebut sangat berdampak terhadap pemasukan Iran, Iran masuk pada titik terendah dimana perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Iran kebanyakan meninggalkan Iran, namun, Iran bisa dikatakan memprioritaskan konflik di Yaman khususnya membantu kelompok Houthi daripada kerjasama dengan negara lain sehingga banyak yang terhambat bahkan batal termasuk dengan Indonesia yang sama sekali pembangunan pembangkit listrik 5000 MW nya tidak direalisasikan oleh Iran. Sehingga adanya bantuan Iran terhadap konflik di Yaman ini merupakan salah satu faktor penghambat Iran tidak bisa membangun MPP 5000 MW di Indonesia.

Besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Iran pada tahun 2017 bukan tanpa sebab tetapi dengan anggaran tersebut Iran bisa memaksimalkan untuk membiayai keamanan dan pertahanan negara, kepentingan dukungan konflik eksternal membuat beberapa hubungan kerjasama yang dilakukan Iran dengan negara lain menjadi terkendala baik secara ekonomi maupun diplomatik salah satunya kerjasama dengan Indonesia di bidang energi.

C. Teknologi Turbine Buatan Iran

Peluncuran MPP di Iran menjadi penghambat dalam membangung MPP di Indonesia karena Iran baru pertama kali mengimplementasikan turbine tersebut menjadi MPP atau pembangkit listrik bergerak di negaranya pada Juni tahun 2017, di Iran Utara yaitu di kota Noshahr dan Behshahr. Peluncuran pembangkit ini menjadi keraguan karena harusnya teknologi MPP tersebut sudah bisa di terapkan di Indonesia. Namun, Iran sendiri baru mencoba untuk mengaplikasikannya pada tahun 2017 padahal kontrak pembangunan MPP di Indonesia oleh Iran sejak tahun 2016. Kapasitas listrik yang telah dibangun di Iran hanya 25 MW (en.mehrnews.com, 2020). Peluncuran Pembangkit listrik yang diimplementasikan tersebut dapat dipasang dan diluncurkan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Menurut MAPNA, stasiun tersebut dapat memasuki jaringan listrik dalam waktu kurang dari 25 menit dan dapat berfungsi dengan bahan bakar gas dan solar.

Gambar Pembuatan *Mobile Power Plant* (MPP) Pertama Iran Tahun 2017

Sumber : *Iran Builds ME's 1st* MPP

Setelah dua MPP tersebut beroperasi, pemerintah Iran mengatakan selanjutnya Iran akan bergabung dengan AS, Jerman, dan Rusia, untuk memperoleh pengetahuan tentang cara membuat pembangkit litrik bergerak agar dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pembangkit listrik bergerak. Dari pengaplikasian MPP di dua tempat pada tahun 2017 tersebut, menunjukkan bahwa Iran baru bisa menerapkan teknologinya terhadap pembangkit listrik Mobile atau bergerak di negaranya sendiri pasca kontrak kerjasama dengan Indonesia di lakukan yaitu akhir tahun 2016 mengenai rencana pembangunan MPP di Indonesia sebesar 5000 MW.

Berdasarkan perjanjian awal pembangunan MPP tersebut titik pembangunannya disesuaikan dengan perencanaan kebutuhan listrik di wilayah Indonesia, ini berarti jika disesuaikan dengan rencana pembangunan listrik Indonesia dari tahun 2017 hingga 2020 yaitu ada 156 lokasi yang dibangun oleh PLN dan 135 titik lokasi dibangun oleh pihak swasta atau investor termasuk Iran dengan mekanisme IPP atau kurang lebih 397 unit pembangkit listrik. Kondisi ini menunjukkan bahwa Iran belum bisa menerapkan atau membangun MPP di Indonesia karena negara mereka sendiri baru mengaplikasikan teknologi tersebut. Ditambah lagi pada 2018 Iran baru belajar untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan tentang pembangkit bergerak atau MPP yang berarti Iran sendiri masih berupaya untuk meningkatkan kemampuanya untuk bisa benar benar membuat pembangkit yang berstandar Internasional.

Kondisi ini pula yang membuat penulis berasumsi bahwa Iran masih berupaya untuk menyesuaikan diri untuk membangun MPP di Indonesia. Disamping itu adanya embargo dari Amerika memberikan dampak yang cukup besar bagi pendapatan Iran.

Kesimpulan

Meningkatnya kebutuhan energi di Indonesia khususnya energi listrik, mengharuskan Indonesia melakukan kerjasama guna memenuhi kebutuhan energi tersebut, melalui kerjasama pembangunan *Mobile Power Plant* (MPP) dengan Iran yang dimulai akhir tahun 2016 hingga tahun 2020. Dalam kerjasama pembangunan MPP ini, Iran menjanjikan untuk membangun MPP sebesar 5000 MW. Pada tahun 2017 dan 2018 Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan dengan menagih kembali komitmen Iran mengenai pembangunan pembangkit listrik ini. Namun, pihak Iran masih belum bisa memutuskan kelanjutan dari pembangunan tersebut.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat 3 hambatan Iran dalam pembangunan MPP di Indonesia. Hambatan yang pertama adalah *external shock* yaitu berupa hambatan ekonomi terkait embargo ekonomi yang diberikan AS. Embargo ini beberapa kali dicabut kemudian kembali diberikan terhadap Iran sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi Iran. Belum lagi pada tahun 2017 terdapat beberapa kasus dalam negeri Iran yang menyangkut keuangan sehingga membuat kondisi internal di Iran mengalami pengaruh padahal Iran baru saja lepas dari sanksi AS pada awal tahun 2016. Dampak embargo yang dialami Iran juga berpengaruh terhadap bank sentral, sektor otomotif, logam mulia, bahan makanan, perdagangan, pendapatan dari ekspor impor minyak Iran dan sanksi terebut juga mempengaruhi transportasi maupun jalur yang digunakan oleh Iran untuk melakukan pengiriman komoditas ekspor-impor.

Faktor penghambat kedua adalah keterlibatan Iran dalam konflik Yaman khususnya bantuan untuk kelompok Houthi yang berupa bantuan persenjataan, bahan pangan, pelatihan militer, bantuan tentara nasional Iran dan bantuan lainnya yang bisa melancarkan gerakan kelompok Houthi di Yaman sejak 2015 hingga sekarang. Bila dilihat pada tahun 2015 Iran masih dilanda krisis ekonomi kemudian di tahun 2018 dijatuhi embargo ekonomi oleh AS, tetapi Iran masih berupaya mendukung kelompok Houthi di Yaman.

Faktor penghambat ketiga yaitu dari sisi internal Iran yang baru pertama kali menerapkan pembuatan MPP teknologi turbine tahun 2017. Peluncuran pembangkit ini menjadi keraguan karena harusnya teknologi MPP tersebut sudah bisa di terapkan di Indonesia. Namun, Iran baru mencoba untuk mengaplikasikannya pada tahun 2017 padahal kontrak pembangunan MPP di Indonesia sejak akhir tahun 2016.

Daftar Pustaka

Gustavsson, Jakob. 1999. *How Should We Study Foreign Policy Change?Cooperation and Conflict.* Vol 34: Harvard

Starke, JG. 2001. *Pengantar Hukum Internasional (Jilid 1,2)*. Jakarta: Sinar Grafika

Kalicki, Jan H. dan DavidL. Goldwyn. 2005. *Energy and Security: Toward new Foreign Policy strategy.* Washington DC: Woodrow Wilson Center Press

Kusumohamidjojo, Budiono. 1987. *Hubungan internasional: Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Bina Cipta

Mahdieh Aghazadeh. 2014. *International Sanctions And Their Impacts On Iran's Economy.* International Journal Of Economics And Finance StudiesRizky Octa P.C. 2015. *Kepentingan Iran Melakukan Intervensi Terhadap Konflik Internal Yaman Tahun 2014-2015*. Samarinda: Fisip Unmul

Baru 3% Dari proyek 35 Ribu MW Yang Beroperasi, Tersedia di https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20180111093220-85-268063/baru-3-persen-dari-proyek-35-ribu-mw-yang-beroperasi, diakses pada tanggal 17 Juli 2020

Danai Perang untuk Konflik di Berbagai Negara, Anggaran Militer Iran Membengkak
Tersedia di, https://jurnalislam.com/danai-perang-untuk-konflik-di-a-anggaran-militer-iran-membengkak/ diakses pada 5 Mei 2021

Iran Berminat Investasi Pembangkit Listrik 5000 MW, tersedia di https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/berita/2016/09/15/iran-lirik-investasi-pembangkit-listrik-5000-mw diakses pada tanggal 06 Mei 2020

Iran builds ME's 1st mobile power plant, tersedia di https://en.mehrnews.com/news/125685/Iran-builds-ME-s-1st-mobile-power-plant diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

JK Bahas Nuklir Iran dan Investasi Migas dengan Wapres Iran, Tersedia di https://www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/Pnge80Pk-jk-bahas-nuklir-dan-investasi-migas-dengan-wapres-iran, diakses pada tanggal 16 Juli 2020

Luhut Tagih Komitmen Investasi Kelistrikan Ke Iran, Tersedia di https://katadata.co.id/amp/pingitfajrin/ebergi/5e9a56403bb53/luhut-tagih-komitmen-Investasi-ke-iran, diakses pada tanggal 16 Juli 2020

Mengamati Pola Hubungan Iran-AS, tersedia di http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/timur-tengah/716-mengamati-pola-hubungan-iran-as.pdf diakses pada 28 Desember 2020

Kerjasama Indonesia Iran dalam pengembangan Migas, tersedia di https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kerja-sama-indonesia-iran-dalam-pengembangan-migas diakses pada tanggal 3 February 2020

Proyek 35 GW PLN Selesai 2024 Mendatang, Tersedia di https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/polmvq423, diakses pada tanggal 17 Juli 2020

UN: Iran Arming Houthi Rebels in Yemen Since 2009, terdapat di esofisrael.com/un-iran-arming-Houthi-rebels-in-yemen-since-2009/ diakses pada 4 Mei 2021

Hossein Fereydoun: Iranian President's Brother Begins Prison Term tersedia di, https://bbc.com/news/world-middle-east-50068577 diakses pada15 Maret 2021

Protest Over Alleged Coruption And Rising Prices Spread To Tehran, Tersedia di https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/world/2017dec/29/iranian-police-disperse-anti-government-protests diakses pada 15 Juli 2020